

**ANALISIS BIAYA DAN PENDAPATAN USAHA
PEMANENAN KAYU HUTAN RAKYAT DI KECAMATAN
DONRI – DONRI KABUPATEN SOPPENG**

IRNA MAYANG SARI

M 111 09 275



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Biaya Dan Pendapatan Usaha Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Irna Mayang Sari
N i m : M111 09 275
Program Studi : Kehutanan

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan

pada

Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si
NIP. 19630915199003 1 004

Dr. H. A. Mujetahid, S.Hut, MP
NIP. 19690208199702 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc
NIP. 19540418197903 1 001

Tanggal Lulus :

Agustus 2013

ABSTRAK

IRNA MAYANG SARI (M111 09 275). Analisis Biaya Dan Pendapatan Pelaku Pemanenan Kayu Hutan Rakyat Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, di bawah bimbingan Iswara Gautama dan H. A. Mujetahid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya pemanenan kayu yang dikeluarkan pelaku pemanenan dan besarnya pendapatan yang di peroleh pengusaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemanenan kayu pada hutan rakyat. Dalam artian masyarakat dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang mereka peroleh dalam kegiatan pemanenan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2013 pada hutan rakyat di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan tahapan proses pemanenan kayu rakyat.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (*Observasi*), dokumentasi dan teknik wawancara (*Quisioner*) mengenai variabel biaya-biaya yang timbul pada kegiatan pemanenan di hutan rakyat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian atau laporan-laporan, lembaga atau instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat teoritis tentang analisis biaya dan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah menghitung besarnya biaya pada kegiatan pemanenan dan pendapatan (keuntungan) pemilik lahan dari hasil penjualan log jati.

Analisis data meliputi: Pengumpulan data (pencatatan dan perhitungan variabel biaya secara langsung dan tidak langsung), penggolongan biaya tetap (*Fixed Cost*) dan biaya variabel (*Variable Cost*), biaya total (*Total Cost*), penerimaan (*Revenue*), pendapatan Hasil perhitungan rata-rata biaya pemanenan hutan rakyat dari 2 pengusaha tahun 2013 di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng adalah sebesar Rp 973.867,25/m³. yang terdiri dari rata-rata biaya tetap sebesar Rp. 12.726,36/m³ dan rata-rata biaya tidak tetap sebesar Rp. 908.257,15/m³, sedangkan Rata-Rata penerimaan dari 2 pengusaha yaitu Rp.2.388.926,73/m³ dan biaya total sebesar Rp.973.867,25/m³. sehingga Rata-Rata Pendapatan Bersih dari 2 pengusaha sebesar Rp. 1.467.943,22/m³.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, serta perlindungan dan bantuan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Anaalisis Biaya Dan Pendapatan Pelaku Pemanenan kayu Hutan Rakyat Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng* "

Dengan tidak melupakan uluran tangan dan bantuan yang telah Penulis peroleh dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan baik materiil maupun moril, kepada :

1. Bapak *Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si* dan Bapak *Dr. Ir. H. A. Mujetahid, M.P* sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya, meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk memberi bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak *Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP* selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan Bapak *Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc* selaku Pembantu Dekan I.
3. Bapak *Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si, Dr. Ridwan, M.SE, dan Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr* sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan, kritikan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.

4. Bapak *Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc.* dan *Dr. Suhasman, S.Hut, M.Si* selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Kehutanan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan beserta Bapak dan Ibu Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan, bantuan dan bimbingan.
6. Bapak *Basri* yang meluangkan waktu untuk mengurus pesuratan-pesuratan.
7. Rekan-rekan seperjuangan *KKNP/Magang Gel 04, Terkhusus Buat Kelompok 2* yang memberi cerita yang selalu hangat untuk dikenang.
8. Teman-teman *Pemanenan Crew (evi,acha dan masrur)* terkhusus (*Cindy, Anti, Hamdi dan ayha*), terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat dan dorongan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman *Forester '09'* dan semua rekan-rekan mahasiswa Kehutanan Unhas yang telah menjadi bagian kehidupanku di Kampus.
10. Buat teman-teman ku ulu-ulu crew *openk,dillha,inha*, terima kasih motivasi, dorongan dan semangat dari kalian.
11. Buat *KPH Malang, BKPH Sengguruh, dan BKPH Kepanjen* yang telah banyak membantu dalam proses Magang.
12. Bapak *Tanggung dan H.Abbas* yang telah banyak membantu pada penyelesaian penelitian di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga ku persembahkan teruntuk Ayah-Bundaku *Najong.s* dan *Mariani*, Saudaraku *Iksan Pramana,Irham Nur* dan seluruh keluarga terima kasih atas doa restu tak terujung, pengertian, nasehat

yang tiada henti dan pengorbanan tiada akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersimpati pada skripsi ini untuk penyempurnaannya. Akhir kata, tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita di dunia dan di akhirat. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2013

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan Rakyat	5
B. Pemanenan Hasil Hutan	12
1. Penebangan	15
2. Pembagian Batang.....	16
3. Penyaradan	16
4. Pengangkutan	17
C. Pengertian dan Penggolongan Biaya.....	18
1. Pengertian Biaya	18
2. Penggolongan Biaya	19
a. Biaya Tetap (<i>Fixed Cost</i>).....	19
1) Biaya Penyusutan.....	19
2) Biaya Bunga Modal	21
b. Biaya Variabel (<i>Variable Cost</i>)	21
3. Biaya Total (<i>Total Cost</i>).....	23
4. Pendapatan (<i>Total Revenue</i>).....	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	28
B. Populasi dan Sampel	28

C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	28
1. Data Primer	28
2. Data Sekunder	29
D. Analisis Data	29
1. Biaya Tetap.....	29
2. Biaya Variabel.....	30
3. Biaya Total	31
4. Penerimaan	31
5. Pendapatan Bersih	32
E. Konsep Operasional.....	32

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi.....	34
1. Letak dan Luas	34
2. Topografi dan Kondisi Lapangan	34
3. Tata Guna Lahan.....	35
4. iklim	35
B. Keadaan Sosial Ekonomi	37
1. Penduduk.....	37
2. Mata Pencaharian	38
3. Sarana dan Prasarana.....	39
4. Agama dan Adat Istiadat	40

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Pelaku Pemanenan Hutan Rakyat	41
1. Umur	41
2. Tingkat Pendidikan.....	42
3. Jumlah Tanggungan Keluarga.....	42
4. Mata Pencaharian	43
B. Deskripsi Proses Pemanenan Kayu Rakyat.....	43
1. Sistem Upah Kegiatan Pemanenan Kayu	43
a. Penebangan	44
b. Penyaradan	44
c. Pengangkutan.....	45
2. Analisis Biaya Pemanenan Kayu di Hutan Rakyat	45
1. Biaya Tetap (<i>Fixed Cost</i>).....	45
a. Biaya Penyusutan (D).....	46
b. Biaya Bunga Modal (B)	46
2. Biaya Variabel (<i>Variable Cost</i>).....	48
a. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	48
b. Biaya Bahan Bakar	48
c. Biaya Tenaga Kerja	49

d. Biaya Pengangkutan	50
e. Biaya Penatausahaan Hasil Hutan	50
f. Biaya Pembelian Pohon Berdiri	50
3. Biaya Total (<i>Total Cost</i>).....	52
4. Penerimaan (Pendapatan Kotor).....	54
5. Pendapatan Bersih (Keuntungan).....	55

V. PENUTUP

Kesimpulan.....	57
Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Tata Guna Lahan di Desa Sering Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng	35
2.	Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan selama 5 Tahun Terakhir di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng (2005 – 2012)	36
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan kering, dan Bulan Lembab Selama 5 Tahun Terakhir di Desa Sering Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng (2008 – 2012))	35
4.	Nilai Q Tipe Iklim Berdasarkan Cara Schmidt dan Ferguson	37
5.	Jumlah Penduduk Desa Sering Kecamatan Donri–Donri Kabupaten Soppeng Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	38
6.	Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Mata Pencaharian Penduduk Des Sering	39
7.	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Sering Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng	39
8.	Rekapitulasi Biaya Tetap dari 2 Pengusaha Kayu di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Toraja	47
9.	Rekapitulasi Biaya Tetap dari 10 Pengusaha Kayu di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja	48
10.	Rekapitulasi Biaya Tidak Tetap dari 2 Pengusaha Kayu di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.....	51
11.	Rekapitulasi Biaya Tidak Tetap dari 3 Pemilik Hutan Rakyat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.....	52
12.	Akumulasi Biaya Tetap, Biaya Tidak Tetap, dan Biaya Total dari 2 Pengusaha	52
13.	Rekapitulasi Biaya Tetap, Biaya Tidak Tetap, dan Biaya Total dari Tiga Pemilik Lahan di Kecamatan Mengkendek	53

14.	Penerimaan Pengusaha Kayu di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	54
15	Rekapitulasi Penerimaan dari Tiga Pemilik Lahan di Kecamatan Mengkendek	55
16.	Rekapitulasi Total Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Bersih dari 2 Pengusaha Kayu di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri	55
17.	Rekapitulasi Total Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan Bersih Tiga Pemilik Lahan di Kecamatan Mengkendek	56

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Lokasi Penelitian	81
2.	Log Jati	81
3.	Proses pengangkutan Log	81
4.	Proses Wawancara	81

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1	Identitas Pengusaha Pemanenan Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng	62
2.	Identitas Regu Pemanen H. Abbas Hutan Rakyat di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng	63
3.	Identitas Regu Pemanen Tanggong Hutan Rakyat di Kecamatan Donri- donri Kabupaten Soppeng	64
4.	Peralatan Pemanenan Kayu Hutan Rakyat dari Dua Pengusaha Kayu di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng	65
5.	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 2 pengusaha kayu di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	66
6.	Analisis Biaya dari Pengusaha H. Abbas di Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng	67
7.	Analisis Biaya dari Pengusaha Tanggong di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng	74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang bernilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dll. Sedangkan manfaat hutan secara tidak langsung yaitu untuk menjaga tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan keamanan, menampung tenaga kerja, menghasilkan kayu dan sebagai tempat untuk rekreasi atau tempat pariwisata. Pemanfaatan dan pengeloaan hasil hutan mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, yaitu sebagai mata pencaharian dan sebagai wadah penyerapan tenaga kerja. Pemanenan kayu hutan rakyat adalah salah satu contohnya.

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan, dan tanaman tahun pertama minimal 500 batang (Dephutbun, 1999). Perkembangan hutan rakyat mulai diperhitungkan keberadaanya sebab semakin berkurangnya kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu sebagai bahan pertukangan, kayu industri maupun kayu energi.

Kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan dan untuk bahan baku industri pada saat ini cenderung semakin meningkat, sedangkan pasokan kayu dari hutan alam (areal HPH) dirasakan tidak mencukupi, sehingga memberikan peluang yang

besar pengembangan hutan rakyat. Dengan adanya peluang pasar bagi hasil hutan rakyat untuk menunjang kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu, maka usaha perhutanan rakyat merupakan peluang berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi pemiliknya, diantaranya sebagai penghasil bahan baku untuk industri finir. Ketersediaan bahan baku dalam suatu industri merupakan unsur yang sangat penting dalam industri. Oleh karena itu di dalam sebuah industri tersedianya bahan baku untuk keperluan proses produksi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

Namun, pemanfaatan bahan baku kayu tersebut tidak dapat terealisasi, jika kegiatan pemanenan tidak dilakukan. Karena Kegiatan pemanenan hutan dengan berbagai macam teknik akan mempengaruhi efisiensi, produktivitas dan biaya pemanenan. Produktivitas pemanenan dapat dihitung dengan mengetahui waktu kerja dan hasil kerja peralatan yang digunakan. Biaya pemanenan dapat dihitung dengan cara mengetahui produktivitas pemanenan, biaya memiliki dan biaya menjalankan alat pemanenan. Biaya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhitungkan secara cermat, karena semua langkah dan kebijakan yang diambil harus berpangkal pada satu tujuan yaitu dapat member keuntungan.

Kecamatan Donri-Donri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Soppeng yang memiliki potensi hutan rakyat. Salah satu potensi tegakan yang dapat dilihat secara nyata adalah tersedianya bahan baku untuk industri meubel yaitu potensi tegakan jati (*tectona grandis*). Masyarakat di Kecamatan Donri-

Donri memanen kayu dari hutan rakyat sebagai mata pencaharian untuk menambah pendapatan mereka. Kayu-kayu tersebut mereka jual kepada industri yang dekat dengan lokasi pemanenan yang mereka lakukan. Namun, para pemanen kayu tersebut belum mengetahui dengan pasti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan setiap kali melakukan kegiatan pemanenan dan pendapatan dari hasil penjualan kayu tersebut. Biaya haruslah didasarkan pada fakta yang bersangkutan, dan cukup terukur sehingga memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan, Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan.

Analisis biaya diperlukan untuk menginterpretasikan biaya yang dihasilkan, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, merencanakan dan mengendalikan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan, dan besarnya pendapatan pada kegiatan pemanenan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang mereka peroleh selama kegiatan pemanenan, khususnya yang berada di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku pemanenan kayu
2. Pendapatan yang diperoleh pelaku pemanenan kayu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemanenan kayu pada hutan rakyat. Dalam artian masyarakat dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan dan pedapatan yang mereka peroleh dalam kegiatan pemanenan. Untuk seterusnya dapat mengupayakan jumlah keuntungan yang seharusnya mereka peroleh sebagai imbalan terhadap upaya-upaya yang mereka lakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Rakyat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya diklasifikasikan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Hutan adat dan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa, serta hutan negara yang manfaat utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan, sedangkan hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan disebut hutan rakyat.

Suharjito (2000) menjelaskan bahwa hutan rakyat dalam pengertian menurut peraturan perundang-undangan ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dalam pengertian ini, tanah negara mencakup tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan masyarakat lokal (biasa disebut masyarakat hukum adat).

Produksi utama hutan rakyat adalah hasil berupa kayu-kayuan baik kayu pertukangan, kayu industri, kayu serat, maupun kayu energi, sedangkan hasil sampingan hutan rakyat dapat diperoleh sebelum hasil utama berupa kayu di panen. Hasil sampingan tersebut dapat berupa getah, nira, buah, biji dan sebagainya. Di sela-sela tanaman pokok kayu apabila dimungkinkan dapat

ditanam jenis lain yang menghasilkan produksi panen musiman (tanaman pangan dan tanaman obat-obatan), sehingga dapat dicapai optimalisasi hasil bagi areal yang bersangkutan dan selanjutnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengusahakan (Supriadi, 2002).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Supriadi (2002), bahwa pengembangan hutan rakyat mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi
3. Terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik, khususnya lahan milik rakyat.
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara.
5. Memberdayakan masyarakat pedesaan.

Balai Informasi Pertanian (1982) membagi bentuk hutan rakyat berdasarkan jenis tanaman menjadi tiga yaitu :

1. Hutan rakyat murni, hutan rakyat yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman pohon berkayu yang ditanam dan diusahakan secara homogen atau monokultur.
2. Hutan rakyat campuran, hutan rakyat yang terdiri dari berbagai jenis pohon-pohonan yang ditanam secara campuran.

3. Hutan rakyat agroforestry, hutan rakyat yang memiliki bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan lain-lain secara terpadu.

Menurut Djajapertjunda (2003), karena hutan rakyat adalah hutan, sama halnya hutan-hutan lainnya yang tanamannya terdiri atas pohon sebagai jenis utamanya, maka peranannya pun tidak banyak berbeda, yaitu :

1. Ekonomi, untuk memproduksi kayu dan meningkatkan industri kecil sebagai upaya untuk meningkatkan peranan dan jaringan ekonomi rakyat.
2. Sosial, dalam membuka lapangan pekerjaan.
3. Ekologi, sebagai penyangga kehidupan masyarakat dalam mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi dan sebagai prasarana untuk memelihara kualitas lingkungan hidup (penyerap carbon dioksida dan produsen oksigen).
4. Estetika, berupa keindahan alam.
5. Sumberdaya alam untuk ilmu pengetahuan, antara lain ilmu biologi, ilmu lingkungan, dll.

Karakteristik hutan rakyat menurut Ditjen RRL (2005) *dalam* Tinambunan (2008):

1. Lokasi hutan rakyat terbatas pada lahan milik, lahan marga atau adat, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak berhutan dan tanah negara yang terlantar.
2. Usaha hutan rakyat ditinjau dari segi usaha, sebagian besar berskala kecil sampai menengah yang dalam pengembangannya menghadapi masalah

pemilikan lahan yang sempit (di Pulau Jawa) dan status lahan sering belum jelas.

3. Pelaksana pengelolaan hutan rakyat biasanya adalah stratum masyarakat paling bawah yang mempunyai kemampuan teknis, ekonomis, dan manajemen minimal.
4. Pola penanaman hutan rakyat tidak monokultur (homogen) tetapi bersifat heterogen, yaitu penanaman berbagai jenis tanaman di satu areal lahan pada waktu bersamaan.
5. Pelaksana pengelolaan hutan rakyat umumnya kurang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan hutan.
6. Kelembagaan pengelolaan hutan rakyat belum berkembang ke taraf yang mantap.
7. Dalam peraturan perundangan yang ada, seperti dalam uraian kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat yang mencapai 10 butir, tidak ada yang mencakup keteknikan hutan.
8. Dimensi kayu yang dipanen biasanya kecil. Sebagai contoh di beberapa hutan rakyat Jawa Barat terlihat bahwa diameter maksimum hanya mencapai sekitar 35 cm.
9. Pola penanaman lain yang khas terdapat di Gunung Kidul, seperti dikemukakan Simon (1995) dalam Tinambunan (2008), ada tiga pola, yaitu (1) penanaman pohon di sepanjang batas lahan milik; (2) penanaman pohon di teras bangku; dan (3) penanaman pohon di seluruh lahan milik.

Menurut Windawati (2004), secara fisik hutan rakyat memiliki pola tanam yang beragam dan berbeda di setiap daerah, baik cara memilih jenis yang dikembangkan maupun cara penataannya di lapangan. Pada umumnya pola tanam yang dikembangkan oleh masyarakat petani dapat diklasifikasikan pada dua pola tanam, yaitu murni dan campuran.

1. Hutan Rakyat Murni

Hutan rakyat yang terdiri dari satu jenis tanaman pokok yang ditanam dan diusahakan secara homogen (monokultur), seperti di Pulau Jawa untuk jenis sengon, jati, dan di Lampung untuk jenis damar mata kucing. Dari jenis silvikultur pola tanam ini memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah dalam pembuatan, pengelolaan dan pengawasannya, namun kekurangannya yaitu kurang tahan terhadap serangan hama penyakit dan angin, juga kurang fleksibel karena tidak ada diversifikasi komoditi sehingga ketahanan ekonominya kurang dan penyerapan tenaga kerja bersifat musiman.

2. Hutan Rakyat Campuran

a. Hutan rakyat campuran (*polyculture*) dengan 2–5 jenis tanaman kehutanan yang dikembangkan dan diusahakan, seperti sengon, mahoni, dan surian, yang dikombinasinya berbeda pada setiap daerah. Dari segi silvikultur cara ini lebih baik daripada hutan rakyat murni, daya tahan terhadap hama penyakit dan angin lebih tinggi, perakaran lebih berlapis dan dari segi ekonomi lebih fleksibel, hasil yang diperoleh berkesinambungan dan tenaga kerja yang terserap lebih banyak, namun pelaksanaannya memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih baik dan terampil.

b. Hutan rakyat campuran dengan sistem *agroforestry* atau wanatani, yaitu berbentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha lainnya seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain secara terpadu. Pola ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional, baik dari aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Penerapannya di lapangan dilakukan dengan cara pemanfaatan suatu ruang tumbuh baik vertikal maupun horizontal dalam bentuk penanaman campuran lebih dari satu jenis seperti jenis kayu-kayuan (sengon dan jati), sayur-sayuran (petai dan nangka), tanaman pangan (singkong dan jagung), hijauan makanan ternak (rumput gajah), tanaman obat-obatan (kapolaga dan jahe), lebah madu, dan lainnya. Kelebihan pola tanam ini yaitu mempunyai daya tahan yang kuat terhadap serangan hama, penyakit, dan angin. Secara ekonomis dapat diperoleh keuntungan ganda yang berkesinambungan melalui panen harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak dan berkelanjutan.

Menurut Djuwadi (2002) *dalam* Wijiadi (2007), pola penanaman hutan rakyat ialah sebagai berikut:

1. Pola pagar, yaitu pola penanaman tanaman kehutanan yang mengelilingi tanaman pertanian.
2. Pola selang-seling, yaitu pola penanaman tanaman kehutanan yang berselang-seling dengan tanaman pertanian. Contohnya: tanaman pertanian satu larik, tanaman kehutanan pada larik berikutnya.
3. Pola *alley cropping*, atau pola terowongan, penanaman tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan berkelompok pada larikan masing-masing.

4. Pola acak, yaitu pola penanaman yang menyebar.
5. Pola mozaik, yaitu pola penanaman tanaman pertanian dan tanaman kehutanan yang mengelompok masing-masing.

Umumnya pola penanaman dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Jika lahan berbukit-bukit, pola yang digunakan ialah mozaik atau acak. Sedangkan jika lahan datar, pola yang digunakan ialah pola pagar, selang-seling, atau *alley cropping*. Menurut Djajapertjunda (2003) dalam Wardhana (2008), potensi hutan rakyat yang sudah berkembang sekarang ini mencapai luasan 1.265.000 ha yang tersebar di 24 propinsi, dan diantaranya diperkirakan seluas 500.000 ha terdapat di Jawa. Potensi tegakan tanaman kayu milik rakyat tersebut diperkirakan mencapai 43.000.000 m³, yang terutama terdiri dari kayu sengon, jati, akasia, sonokeling, mahoni, dan jenis tanaman buah-buahan.

Witanriasti (2010) mengemukakan bahwa pelaksanaan penebangan dilakukan oleh tengkulak, karena petani menjual kayunya dalam bentuk tegakan. Hal ini membuat semua proses kegiatan termasuk biaya penebangan dan biaya angkut diserahkan kepada tengkulak. Witanriasti (2010) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa persepsi petani dalam pembangunan hutan rakyat merupakan penilaian hutan rakyat terhadap kegiatan pembangunan hutan rakyat yang menyangkut penilaian terhadap lahan milik yang dimanfaatkan untuk hutan rakyat. Semakin baik persepsi, maka semakin baik pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2004) dalam Mile (2007) menyebutkan ragam produk dan jasa yang mempunyai nilai

komersial untuk pengembangan hutan rakyat, antara lain: a) hasil hutan berupa kayu pertukangan untuk bangunan, meubel, perkakas kerajinan; b) kayu lapis, *pulp*, dan kertas; c) hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari tanaman serbaguna berupa buah-buahan, biji-bijian, bunga-bunga, getah-getahan, rotan bambu, gaharu, damar, minyak resin, lebah madu, dan sutera alam; d) jasa lingkungan dari ekosistem hutan yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata alam wisata petualangan, hutan pendidikan, dan hutan penelitian.

B. Pemanenan Hasil Hutan

Pemanenan hasil hutan kayu adalah upaya pemanfaatan produk kayu sesuai jenis dan ketentuan limit diameter yang ditetapkan di areal yang telah disahkan sesuai prosedur dengan pola yang tepat disertai perhitungan kerusakan lahan dan tegakan tinggal yang sekecil mungkin. Pemanenan hasil hutan bertujuan untuk mendapatkan nilai pengusahaan atas jenis volume kayu dalam jumlah yang optimal dengan mutu yang memenuhi standar (Departemen Kehutanan, 1999).

Pemanenan hasil hutan merupakan semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penebangan, penggarapan pohon yang diikuti dengan penyaradan, penimbunan, pengangkutan, dan penjualan hasil-hasilnya. Jadi pemanenan hasil hutan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan kehutanan yang merubah pohon atau biomassa menjadi bentuk yang bisa dipindahkan ke lokasi lain sehingga bermanfaat sebagai sumber ekonomi dan kebudayaan masyarakat (Departemen Kehutanan, 1994).

Menurut Baskara (2011) dalam Agus (2011), Reduced Impact Logging atau biasa di singkat dengan RIL adalah suatu pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pemanenan kayu. RIL merupakan penyempurnaan praktek pembuatan jalan, penebangan dan penjaradan yang saat ini sudah ada. Pengelolaan dan pemanenan hutan alam Indonesia diatur dalam sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). TPTI merupakan tahapan pengelolaan hutan yang terencana, terdiri dari penebangan, penanaman areal bekas tebangan dan pemeliharaan tegakan tinggal untuk menjaga kelestarian hasil hutan kayu dan non-kayu. Syarat diameter pohon yang diijinkan untuk ditebang pada sistem ini adalah untuk hutan darat > 50 cm, sedangkan HPT >60 cm.

Dengan menerapkan sistem-sistem tersebut maka keberadaan hutan dengan luasan, keadaan dan kualitas ideal tertentu seperti yang dikehendaki, merupakan keluaran pemanenan hutan yang harus dicapai agar hasil yang diharapkan untuk diperoleh, berupa barang, manfaat, dan nilai-nilai ekosistem yang telah ditentukan dapat dicapai. Kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari akan dipromosikan dengan penetapan teknik RIL, yaitu suatu teknik yang bertujuan mengurangi kerusakan pada tanah dan tegakan tinggal serta dampaknya terhadap kehidupan satwa liar. Penerapan teknik RIL dapat memberikan beberapa kebaikan, antara lain:

1. Pengurangan resiko lingkungan dan sosial.
2. Biaya aplikasi teknik RIL dalam operasi pemanenan hutan tidak berbeda nyata dengan cara pemanenan konvensional, tetapi teknik RIL memberikan

keuntungan ekologis dan sosial yang sangat tinggi dibandingkan cara konvensional.

3. Penerapan teknik RIL memberikan jaminan kepada konsumen untuk menggunakan komoditi yang dihasilkan dari operasi pemanenan berbasis RIL.
4. Penerapan teknik RIL menghasilkan operasi pemanenan yang mengindahkan kebijakan dan peraturan.

Menurut Wiradinata, 1989 tahapan pemanenan kayu yaitu: Proses pemanenan kayu terdiri dari beberapa kegiatan:

1. Operasi tunggak (*stump operation*), yaitu penebangan pohon dan pembentukan permulaan dari log.
2. Penyaradan, yaitu memindahkan batang kayu secara keseluruhan atau berupa log dari tempat penebangan ketempat pengumpulan (*loading*), jarak yang ditempuh hanya beberapa ratus meter.
3. Pemuatan (*loading*), yaitu menaikkan kayu ke atas alat angkut. Kegiatan memuat dilakukan di landing.
4. Angkutan utama, yaitu pengangkutan dari landing ketempat tujuan.
5. Pembongkaran, yaitu membongkar muatan ditempat tujuan

Iskandar dan Sri (2005) dalam Ningsih (2008), menyebutkan bahwa pemanenan kayu (*harvesting*) pada tegakan masa tebang atau sudah mencapai daur merupakan salah satu elemen penting bagi kelangsungan usaha kehutanan. Sistem dan teknik pemanenan meliputi fungsi penebangan, penyaradan (*skidding* atau *forwading*), pemisahan kayu dan limbah, penyepihan (*chipping*) dan pengangkutan dari hutan ke pabrik.

1. Penebangan

Penebangan adalah langkah awal dalam operasi pemanenan kayu di hutan yang bertujuan merebahkan pohon yang dipanen dengan aman dan efisien. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang penebang (operator chain saw) yang dibantu seorang helper. Alat dan perlengkapan yang dibawa dalam kegiatan penebangan terdiri dari sebuah chain saw, sebuah parang atau mandau, peralatan pemeliharaan chain saw terutama gergaji rantai yang sudah ditajamkan, bahan bakar dan pelumas (Elias, 1998). Penebangan merupakan kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam tegakan yang berdiameter sama atau lebih dari diameter batas yang ditentukan (Departemen Kehutanan, 1999).

Kegiatan penebangan dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin hasil kayu yang maksimal serta membatasi kerusakan-kerusakan kayu hasil penebangan dan kerusakan permukaan tanah. Untuk keperluan tersebut, yang perlu dipersiapkan yaitu arah rebah, pelaksanaan penebangan tinggi tunggak yang serendah-rendahnya, pembagian batang, penyaradan, pengupasan kulit dan pengangkutan kayu dari tempat pengumpulan kayu (TPn) ke tempat penimbunan kayu (TPk) (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2002).

Pada dasarnya kegiatan penebangan pohon terdiri dari tiga kegiatan, yaitu :

- a. Persiapan dan pembersihan tumbuhan bawah. Tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan penebangan dan mencegah terjadinya kecelakaan selama kegiatan penebangan.
- b. Penentuan arah rebah.
- c. Pembuatan takik rebah dan takik balas.

2. Penyaradan

Sastrodimedjo (1979), mengatakan bahwa penyaradan dapat dibedakan berdasarkan tenaga yang digunakan, yaitu :

- a. Penyaradan dengan tenaga manusia tanpa peralatan, seperti memikul.
- b. Penyaradan dengan menggunakan tenaga manusia yang dibantu dengan peralatan non mekanis seperti lori dan penyaradan dengan gaya berat.
- c. Penyaradan dengan menggunakan tenaga hewan.
- d. Penyaradan secara mekanis, penyaradan ini kebanyakan menggunakan sistem traktor dan sistem kabel.

Kegiatan yang dilakukan setelah penebangan adalah penyaradan kayu dari tempat penebangan ke TPn, yaitu tempat pengumpulan kayu yang sifatnya sementara sebelum diangkat ke TPk. Penyaradan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan maupun secara mekanis dengan menggunakan traktor atau sistem kuda-kuda di hutan rawa. Penyaradan hasil penebangan dilakukan setelah bagian tajuk dipotong. Penyaradan harus melalui jalan darat yang telah dibuat terlebih dahulu. Penyaradan dilakukan pada saat kayu diikatkan pada rantai atau tali penyaradan di tempat penebangan, kemudian disarad ke TPn atau ke tepi sungai atau ke tepi jalan mobil/jalan lokomotif dan terak setelah dirantai atau penyarad dilepas dari kayu yang telah disarad (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2002).

3. Pembagian Batang

Pembagian batang dilakukan di tempat penebangan. Bila seluruh panjang pohon diangkut, maka pembagian batang adalah untuk sortimen-sortimen yang

dapat digergaji menjadi kayu gergajian dengan kualitas maksimum. Pekerjaan ini meliputi kegiatan pemotongan batang menjadi log-log penghapus kulitnya atau mengerjakan menjadi balok. Pembagian batang sangat menentukan nilai yang dapat diperoleh dari suatu batang (Rostiati, 1990).

Departemen Kehutanan (1996), faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembagian batang yaitu :

- a. Keadaan pohon/batang
- b. Kapasitas alat sarad/alat angkutan
- c. Sortimen yang diminta/dipesan oleh konsumen

Adapun tahap-tahap dalam pembagian batang (bucking) :

- a. Pembersihan cabang (limbing) dan pangkal
- b. Pemotong ujung (topping)
- c. Pembagian batang (bucking)

Faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu :

- a. Kapasitas alat sarad
 - b. Sortimen yang diminta atau industri/pasar
 - c. Adanya cacat (bengkok, kena penyakit/hama)
 - d. Pelaksanaan pembagian batang harus memperhatikan posisi batang.
4. Pengangkutan

Pengangkutan kayu merupakan kegiatan memindahkan kayu yang telah dipotong-potong sesuai sortimen yang dikehendaki, dari TPn ke TPk dengan menggunakan alat angkut truk atau alat angkut lainnya. Selanjutnya ke tempat tujuan penjualan. Pengangkutan meliputi kegiatan pemuatan dan pembongkaran.

Pemuatan merupakan kegiatan menaikkan kayu di TPn ke atas truk untuk diangkut ke TPk atau tempat penyimpanan kayu bulat. Sedangkan pembongkaran kayu ialah kegiatan menurunkan kayu dari atas alat angkutan ke TPk atau tempat penyimpanan. Sistem pengangkutan dipengaruhi letak dan topografi lapangan, geologi, tanah, dan iklim, luas areal, pengangkutan (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2002).

C. Biaya

1. Pengertian Biaya

Hansen (2005) mendefinisikan bahwa biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Secara umum, dalam akuntansi manajemen dikenal 2 (dua) golongan biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap.).

Menurut Mulyadi (1990), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada empat pokok dalam defenisi biaya tersebut di atas yaitu :

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah atau secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Biaya haruslah didasarkan pada fakta yang bersangkutan, dan cukup terukur sehingga memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Para akuntan, insinyur, sarjana ekonomi, dan pihak-pihak lainnya yang menghadapi masalah biaya telah menyusun konsep biaya dan istilah-istilah biaya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidaklah mudah untuk memberikan batasan atau menjelaskan istilah "biaya" tanpa menimbulkan keraguan akan apa yang kita maksudkan. *Committee on Cost Concepts & Standards of American Accounting Association*, misalnya mengatakan bahwa biaya adalah pengorbanan, yang diukur dengan satuan uang yang dilakukan atau harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam *Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises*, biaya dinyatakan sebagai harga penukaran atau pengorbanan yang dilakukan pada saat terjadinya biaya mengambil bentuk susut atau berkurangnya uang atau aktivasi lainnya pada saat ini atau pada saat yang akan datang (Kartadinata, 2000).

2. Klasifikasikasi Biaya

a. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap selama periode waktu tertentu meskipun terjadi perubahan besar dalam total kegiatan atau volume yang berkaitan dengan biaya tetap tersebut (Sinaga, 1988). Biaya tetap adalah konstan dalam jangka pendek, tanpa melihat volume produksi atau penerimaan penjualan. Adapun contoh dari biaya ini adalah sewa, bunga, bahan bakar, gaji eksekutif, dan

departemen fungsional - seperti pembelian dan Litbang - yang dibutuhkan untuk mendukung produk yang dibuat oleh perusahaan (Rosa, 2006).

Komponen biaya tetap antara lain :

1) Biaya Penyusutan

Kartadinata (1983) memberikan pengertian depresiasi sebagai susutnya nilai suatu asset tetap yang disebabkan oleh aus dan koyaknya asset selama digunakan sepanjang waktu. Biaya suatu kekayaan berupa mesin, peralatan, kendaraan, serta asset tetap lainnya yang tidak dapat dibebankan sekaligus pada tahun pembelian tetapi harus disebar selama asset tersebut dapat digunakan.

Kotler (1994), menyatakan bahwa penyusutan adalah modal yang hilang pada suatu peralatan yang disebabkan oleh umur pemakaian. Untuk menentukan penyusutan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a) *Straight line*

Turunnya nilai modal dilakukan dengan pengurangan nilai penyusutan yang sama besar sepanjang umur ekonomis dari alat.

b) *Sum of the years digits*

Memungkinkan penyusutan yang lebih cepat pada tahun-tahun produksi mula-mula dari alat karena pengurangannya dilakukan dengan ukuran faktor yang terbalik dengan menggunakan perbandingan umur dalam tahun dengan jumlah digitnya.

c) *Double declining balance*

Memungkinkan penyusutan yang lebih cepat pada tahun-tahun produksi mula-mula dari harga pokok.

2) Biaya Bunga Modal

Bunga Modal adalah jumlah uang yang dibayarkan atau yang diperhitungkan dalam sejumlah uang atau modal yang terpakai. Bunga modal yang ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada tahun berjalan yaitu sebesar 12 % (Sinaga, 1988).

Menurut Pass dan Lowess (1999), biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah sejalan dengan tingkat output karena lebih berhubungan dengan waktu dan bukannya tingkat aktivitas. Kadang-kadang juga disebut biaya periode, biaya ini meliputi sewa, tingkat biaya peminjaman dan depresiasi. Depresiasi merupakan jatuhnya nilai aset selama waktu penggunaannya. Kondisi dari mesin dan peralatan pabrik yang digunakan dalam produksi terus menerus selama waktu pemakaian dan lambat laun harus diganti. Depresiasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$D = (M - R) / N$$

Dimana :

D : Biaya penyusutan /Depresiasi (Rp/tahun)

M : Modal (Rp)

R : Residu/nilai sisa (Rp 0,-)

N : Umur ekonomis alat (tahun)

b. Biaya Tidak Tetap

Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan (tetap) dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang perilakunya bertingkat (*step like behavior*) yang mempunyai perilaku sebagai *step variable costs*. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat yang sama dengan perubahan volume kegiatan. Setiap perubahan volume kegiatan tidak secara langsung diikuti dengan perubahan biaya (Mulyadi.1999).

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi atau aktivitas masing-masing departemen dalam perusahaan. Biaya variabel terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pengadaan bahan dan biaya transportasi (Dipodiningrat, 1981).

Menurut Kartadinata (2002), pada umumnya biaya variabel memiliki ciri-ciri berikut ini :

1. Jumlah akan berubah berbanding lurus dengan volume produksi.
2. Biaya per satuan, sekalipun volume produksi mengalami perubahan tetapi pada umumnya konstan.
3. Dapat dengan mudah dialokasikan pada bagian-bagian operasional.
4. Pemakaian dan pengawasannya dapat dilimpahkan pada bagian yang bersangkutan.

Biaya variabel bervariasi dalam besaran total secara langsung dengan tingkat produksi, tetapi per unitnya tetap konstan tanpa melihat berapa banyak unit yang diproduksi. Biaya variabel meliputi biaya bahan, biaya pengemasan, dan

ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produk (Rosa, 2006).

c. Biaya Total (*Total Cost*)

Menurut Kartadinata (2002), biaya total adalah besarnya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan sejumlah produk. Biaya total dapat dihitung dengan persamaan

$$\text{Biaya Total} = \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Tidak Tetap.}$$

D. Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan, karena dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Skousen dan Stice (2009) pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aktiva lainnya sebuah entitas pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung.

Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan yang belum mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri. Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dua segi, yaitu :

1. Ilmu ekonomi

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

2. Ilmu akuntansi

Banyak konsep pendapatan didefinisikan dari berbagai literatur akuntansi dan teori akuntansi. Namun pada dasarnya konsep pendapatan dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu :

Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktivitas yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau outflow.

Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.

Kemudian sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi (Fauzi, 1995).

Sedangkan, Menurut Soekartawi (1991), pendapatan adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh. Pendapatan tersebut dibedakan atas dua macam yaitu :

1. Keuntungan (*Net Farm Income*)

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor dengan total biaya yang digunakan selama proses produksi. Pendapatan bersih ini merupakan gambaran nilai keuntungan yang diperoleh petani dalam menghasilkan kegiatan usaha taninya.

2. Pendapatan Kotor (*Gross Farm Income*)

Pendapatan kotor adalah nilai hasil produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang tidak dijual maupun yang dijual.

Soeharjo dan Patong (1973) dalam Kadang (2008), ukuran-ukuran pendapatan petani adalah :

1. Pendapatan kerja petani diperoleh dengan menghitung semua penerimaan yang berasal dari penjualan yang dikonsumsi keluarga dan kenaikan nilai inventaris setelah itu dikurangi dengan semua pengeluaran baik yang tunai maupun yang diperhitungkan bunga modal dan tenaga kerja.
2. Penghasilan kerja diperoleh dengan menambah penghasilan kerja petani dengan nilai kerja keluarga.

3. Pendapatan kerja keluarga diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang diterima petani bersama keluarganya disamping kegiatan pokoknya.
4. Pendapatan keluarga diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang diterima petani bersama keluarganya disamping kegiatan pokoknya.

Besarnya pendapatan yang diterima oleh setiap petani berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala usaha yang diusahakan petani tersebut tetapi juga faktor iklim, jenis tanah, efisiensi produksi, dan efisiensi kerja seorang petani.

a. Pendapatan Nasional Netto (bersih)

Pendapatan Nasional Bersih (Net Nasional Income/NNI) adalah nilai dari produk nasional bersih income) di kurangi dengan pajak tidak langsung.

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

b. Pendapatan Perseorangan

Pendapatan perseorangan (personal income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Pendapatan perseorangan ini dapat juga disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan perseorangan netto jatuh ke tangan pemilik faktor produksi, sebab masih harus di kurangi laba yang tidak di bagi, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial maupun pembayaran yang bersifat transfer payment (pembayaran pindahan) seperti pensiunan.

$$PI = (NNI + \text{Transfer Payment}) - \text{Iuran Jaminan Sosial} + \text{Iuran Asuransi} + \\ \text{Laba Ditahan} + \text{Pajak Perseorangan}.$$

c. Pendapatan Bebas

Pendapatan bebas (Disposable Income /DI) adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan penerimaannya.

Pendapatan ini merupakan hak mutlak bagi penerimanya.

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$$